



## **RENCANA KERJA (RENJA)**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama satu tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026..

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 pada umumnya dan dalam meningkatkan kineija Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang pada khususnya..

Kuala Tungkal, Juli 2022



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	31
2.4. Review Terhadap rancangan Renja .....	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	51
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan .....	52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	54
3.3. Program dan Kegiatan .....	59
Bab IV Penutup .....	78
4.1. Catatan Penting .....	78
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	79
4.3. Rencana Tindak lanjut .....	79

## LAMPIRAN

**TABEL****Halaman**

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 .....	9
Tabel Rekapitulasi pelaksanaan Renja Per sasaran Startegis Tahun 2021.....	23
Tabel Rekapitulasi Realisai Anggaran Per Program dan Per Bagian Tahun 2021.....	27
Tabel Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2023.....	35
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2023.....	56
Tabel 3.3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setda tahun 2023.....	61
Tabel TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 .....	70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 juga tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebagai bahan pertimbangan.

Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2023 berorientasi kepada pencapaian hasil. Oleh karena itu, berkenaan dengan program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 didasarkan kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Rencana Kinerja (RENJA) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tetntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 23 tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan daerah.

11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708/ Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889/Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 66);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan.
3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antar bidang, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kinerja (RENJA).**

##### **BAB. I. Pendahuluan**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sub Bab ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renja, Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sub Bab ini memuat uraian mengenai: Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah**

Sub Bab ini memuat uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sub Bab ini memuat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

### **BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja terhadap program dan kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Program Kegiatan.

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sub Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sub Bab ini memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Sub Bab ini memuat penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), dan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

### **BAB III. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD.

## BAB III

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dan evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatanpun terus dilakukan seiring dilaksanakannya penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat daerah tahun sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada hasil capaian target kinerja yang telah ditentukan dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan secara periodik. setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja, yaitu dilakukan pada akhir tahun. Hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar dalam pencapaian target dengan tujuan untuk mempertahankan maupun memperbaiki dari kualitas pelayanan publik.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021 sebagai ukuran keberhasilan dan kegagalan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut :

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	15
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH</b>										
<b>Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat</b>											
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	500%	0%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	200%	40%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	500%	0	100%	100.00%	100%	100%	200%	40%	
		Nilai AKIP Perangkat Daerah Setda	71,20 (BB)	0	>60,39 (B)	>60,39 (B)	100.00%	>62.55 (B)	>62.55 (B)	40%	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bagian Setda yang diselenggarakan	50 Dokumen	0	10 Dok	10	100.00%	10	20	40%	
		Jumlah dokumen perencanaan setda yang disusun sesuai dengan aturan dan tepat waktu	50 Dokumen	0	10 Dok	10	100.00%	10	20	40%	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen RKA SKPD	4 Dok	0	0	0	100.00%	1	1	25%	



4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan SKPD	4 Dok	0	0	0	100.00%	1	1	25%	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Renstra, Dokumen Laporan Pelaksanaan Renja, Dokumen Laporan IKU, Dokumen Laporan Rencana Aksi,	20 Dok	0	0	0	100.00%	5	5	25%	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja SKPD, Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan LKPJ	12 Dok	0	0	0	100.00%	3	3	25%	
'4.01.01.2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu</b>	<b>500%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>200.00%</b>	<b>40.00%</b>	
'4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	60 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40.00%	
'4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	315 orang		63 Org ASN	63	100.00%	63	126	40.00%	
'4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD	10 laporan		2 laporan	2	100.00%	2	4	40%	
		Jumlah dokumen laporan keuangan	10 Dok		2 Dok	2	100.00%	2	4	40%	
'4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran	5 Dokumen		1 Dok	1	100.00%	1	2	40%	
		Jumlah dokumen pelaporan setda	20 Dokumen		4 Dok	4	100.00%	0	4	20%	
'4.01.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah</b>	<b>60 bulan</b>	<b>0</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12</b>	<b>100.00%</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>40%</b>	
'4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	60 bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40%	
'4.02.01.2.03	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase BMD terkelola dengan baik</b>	<b>500%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>40%</b>	
'4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD OPD yang terkelola	6035 BMD	0	1137 BMD	1137	100.00%	1137	2274	38%	

Sasaran : Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

'4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	500%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	200.00%	40.00%	Bagian UMUM
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)	89,00	0	80,66	80,66	100.00%	80.7	80.7	90.67%	
		Tingkat kehadiran pegawai / ASN	500%	0%	100%	98%	98.00%	100%	198%	39.60%	
'4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	2798 stel	0	542 stel	462	85.24%	542	1004	35.88%	
'4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitas Koordinasi Kegiatan Staf Ahli	15 Staf Ahli	0	3 Staf Ahli	3	100.00%	3	6	40%	
		Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang di Jalankan	10 Aplikasi	0	2 Aplikasi	1	50.00%	2	3	30%	
		Jumlah Waktu Fasilitas Makanan dan Minuman Staf Ahli	60 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40%	
'4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan/Pelatihan yang difasilitasi	75 Orang	0	2 Orang	0	0.00%	15	15	20%	
'4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	60 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40%	
'4.01.01.2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	60 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40.00%	
		Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	60 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40.00%	
'4.01.01.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) yang Tersedia	55 Jenis/Item	0	11 Jenis/Item	11	100.00%	11	22	40.00%	
'4.01.01.2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	300 Jenis/Item	0	60 Jenis/Item	59	98.33%	59	118	39.33%	
'4.01.01.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik (alat dan bahan pembersih/kebersihan) kantor	60 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40.00%	
		Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor	60 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40.00%	
'4.01.01.2.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (Blangko, Formulir, Buku, Map) dan Penggandaan yang tersedia	30 Jenis/Item	0	6 Jenis/Item	6	100.00%	6	12	40%	
'4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu kunjungan tamu yang difasilitasi	48 Bulan	0	0	0	0.00%	12	12	25.00%	

'4.01.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH</b>	<b>500%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>40%</b>
'4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan yang Tersedia	64 Unit	0	0	0	0.00%	2	2	3%
'4.01.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	- Jumlah Waktu Pengadaan Mebel yang tersedia	48 Bulan	0	0	0	0.00%	12	12	25%
'4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang tersedia	175 Jenis/Item	0	30 Jenis/Item	30	100.00%	35	65	37%
'4.01.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>500%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>40%</b>
'4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Pendistribusian dan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Setda	60 bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40%
'4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Beban Pemakaian Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet/TV Berlangganan	60 bulan	0	12 bulan	12	100.00%	12	24	40%
		Jumlah Waktu Penyediaan Beban Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan	60 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40%
		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	0	12 bulan	12	100.00%	12	24	40%
'4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40%
'4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	225 Jenis/Item	0	45 Jenis/Item	45	100.00%	45	90	40%
		Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Kebersihan) Kantor	60 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40%

'4.01.01.2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>500%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>40%</b>
'4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	440 Unit	0	88 Unit	88	100.00%	88	176	40%
		Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan (Tenaga Supir) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	60 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40%
'4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah Waktu Pemeliharaan Mebel	48 bulan	0	0	0	0.00%	0	0	0%
'4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	60 bulan	0	12 bulan	12	100.00%	12	24	40%
'4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	5 Gedung	0	1 Gedung	1	100.00%	1	2	40%
		Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara/Rehabilitasi	15 Bangunan	0	3 Bangunan	3	100.00%	3	6	40%
'4.01.01.2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH</b>	<b>Persentase gaji dan Operasional KDH/WKDH yang dibayarkan</b>	<b>500%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	<b>200.00%</b>	<b>40%</b>
'4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Jumlah KDH/WKDH yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	10 orang	0	2 orang	2	100.00%	2	4	40%
'4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Jumlah orang yang difasilitasi untuk pakaian Dinas	10 orang	0	0	0	0.00%	0	-	0%
'4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	-Jumlah Waktu Penyediaan Dana Operasional KDH/WKDH	36 bulan	0	0	0	0.00%	0	0	0%
<b>04.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia</b>	<b>300%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
04.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	36 bulan	0	0	0	0.00%	0	0	0%
04.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	36 bulan	0	0	0	0.00%	0	0	0%
04.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	36 bulan	0	0	0	0.00%	0	0	0%

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif

'4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran, tepat fungsi	100%	0%	100%	73.11%	73.11%	0.00%	73.11%	73.11%	Bagian Organisasi
'4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang Right Sizing	3 OPD	0	3 OPD	3	100.00%	0	3	100.00%	
		Jumlah Peraturan Bupati terkait kelembagaan	3 Perbup	0	3 Perbup	3	100.00%	0	3	100.00%	
		Jumlah Tersusunnya Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1	100.00%	0	1	100.00%	
		Jumlah Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1	100.00%	0	1	100.00%	
'4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80%</b>	<b>0</b>	<b>80.00%</b>	<b>84.61%</b>	<b>105.76%</b>	<b>0</b>	<b>84.61%</b>	<b>105.76%</b>	
		Persentase Survey Kepuasan Masyarakat	100%	0	100%	100%	100%	0.00%	100%	100.00%	
		Jumlah Tersusunnya Laporan SOP	25 SOP	0	25 SOP	44	176.00%	0	44	176.00%	
		Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan	2 Regulasi	0	2 Regulasi	2	100.00%	0	2	100.00%	
		Data Pengaduan Pelayanan Publik Terpadu	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1	100.00%	0	1	100.00%	
		Data Inovasi Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1	100.00%	0	1	100.00%	
'4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	<b>Nilai AKIP Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>91.11%</b>	<b>91.11%</b>	<b>0.00%</b>	<b>91.11%</b>	<b>91.11%</b>	
		Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	0	1 Laporan	1	100.00%	0	1	100.00%	
		Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten	1 Laporan	0	1 Laporan	1	100.00%	0	1	100.00%	
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	<b>Nilai Kematangan Perangkat Daerah</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>29</b>	<b>29</b>		
'4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah regulasi kelembagaan	112 regulasi	0	0	0	0.00%	3	3	25.00%	
		Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	4 Dokumen	0	0	0	0.00%	1	1	25.00%	
		Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	4 Dokumen	0	0	0	0.00%	1	1	25.00%	



'4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>88.31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>80.66</b>	<b>80.66</b>	<b>80.66</b>	
		Jumlah dokumen SOP	4 Dokumen	0	0	0	0.00%	1	1	25.00%	
		Jumlah Laporan Inovasi Pelayanan Publik	4 Laporan	0	0	0	0.00%	1	1	25.00%	
		Jumlah OPD yg dilakukan survey IKM	176 OPD	0	0	0	0.00%	44	44	25.00%	
'4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	<b>Nilai AKIP Kabupaten</b>	<b>&gt;70,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>&gt;60,01</b>	<b>&gt;60,01</b>	<b>&gt;60,01</b>	
		Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP)	4 Laporan	0	0	0	0.00%	1	1	25.00%	
		Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	4 Laporan	0	0	0	0.00%	1	1	25.00%	

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah

'4.01.01.2.14	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi</b>	<b>500%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>40%</b>	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
'4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi kegiatan pimpinan daerah yang dilakukan secara keprotokolan	60 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	12	24	40.00%	
		Jumlah dokumen kegiatan keprotokolan	5 Dokumen	0	1 Dokumen	1	100.00%	1	2	40.00%	
'4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Frekuensi pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah	12 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	0	12	100.00%	
		Jumlah media jurnal/surat kabar yang dilakukan kerjasama peliputan kegiatan pimpinan daerah	90 Media	0	90 Media	90	100.00%	0	90	100.00%	
		Frekuensi pengelolaan dokumen laporan kegiatan pimpinan	48 Buah	0	0	0	0.00%	12	12	25.00%	
		Jumlah bahan bacaan pimpinan Sekretariat Daerah	60000 Exp	0	0	0	0.00%	36000	36000	60.00%	
'4.01.01.2.14.03	Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Frekuensi jasa penayangan dokumentasi cetak dan digital kegiatan pimpinan	12 Bulan	0	12 Bulan	12	100.00%	0	12	100.00%	
		Frekuensi sewa billboard area bandara	16 Kali	0	16 Kali	16	100.00%	0	16	100.00%	
		Frekuensi pengelolaan data dokumentasi kegiatan pimpinan	48 Bulan	0	0	0	0.00%	12	12	25.00%	
		Jumlah dokumen kegiatan pendokumentasian	4 Dokumen	0	0	0	0.00%	1	1	25.00%	

Sasaran : Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah

'4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase keterisian data IKK LPPD	500%	0%	100%	100%	100.00%	100%	200%	40.00%	Bagian Tata Pemerintahan
'4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Skorr LPPD	3<ST<4	0	3<ST<4			3<ST<4			
'4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah	5 Laporan	0	1 Laporan	1	100.00%	1	2	40.00%	
		Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal	5 Laporan	0	1 Laporan	1	100.00%	1	2	40.00%	
		Jumlah Pelaksanaan Event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan	10 Event (HUT RI & Hari Jadi Kab.	0	2 Event (HUT RI & Hari Jadi Kab.	2	100.00%	2	4	40.00%	
		Cakupan wilayah monitoring kesiapan tahapan Pemilu, Pilkada dan Pilpres	65 Kecamatan	0	13 Kecamatan	0	0.00%	13 Kec.	13	20.00%	
'4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Pembuatan nama Rupabumi	5 Laporan	0	1 Laporan	0	0.00%	1	1	20.00%	
		Jumlah Tanda Batas Kabupaten	20 Tanda	0	4 Tanda	4	100.00%	4	8	40.00%	
		Jumlah tanda batas Kecamatan	40 Tanda	0	8 Tanda	8	100.00%	8	16	40.00%	
'4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian camat teladan	65 Kecamatan	0	13 Kecamatan	0	0.00%	13	13	20.00%	
		Jumlah Rapat Koordinasi camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	5 Kali Rakor	0	1 Kali Rakor	1	100.00%	1	2	40.00%	
		Jumlah laporan pengawsan pelaksanaan PATEN	5 Laporan	0	1 Laporan	1	100.00%	1	2	40.00%	
		Jumlah monitoring pelaksanaan perencanaan, penganggaran perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yg baik tingkat kelurahan	10 Laporan	0	2 Laporan	2	100.00%	2	4	40.00%	

Sasaran : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat

'4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	500%	0%	100%	100%	100.00%	100%	200%	40.00%	Bagian Kesejahteraan Masyarakat
		Capaian Prestasi MTQ tingkat Provinsi	3 Besar	0	3 Besar	Juara 1 Umum	300.00%	3	3	100.00%	
'4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten dilaksanakan	130 Cabang Lomba	0	0	0	0.00%	26	26	20.00%	
		Jumlah Pengajian ASN dan Masyarakat	192 Kali	0	0	0	0.00%	48	48	25.00%	
		Jumlah cabang lomba musyabaqah tilawatil qur'an (MTQ) tingkat provinsi yang diikuti	130 Cabang Lomba	0	26 Cabang Lomba	26	100.00%	26	52	40.00%	
		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan	39 Kali Peringatan Hari Besar	0	9 Kali Peringatan Hari Besar	9	100.00%	6	15	38.46%	
		Jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an yang dilaksanakan	15 Kali Pembinaan	0	3 Kali Pembinaan	3	100.00%	3	6	40.00%	
		Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ	25 Kali Tahapan	0	5 Kali Tahapan	5	100.00%	5	10	40.00%	
		Jumlah Peserta pelatihan takmir Masjid	200 Orang	0	0	0	0.00%	50	50	25.00%	
		Jumlah Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Safari Subuh dan Jum'at	192 Fasilitasi	0	0	0	0.00%	48	48	25.00%	
'4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah proposal permohonan hibah sarana/prasarana rumah ibadah yang ditindaklanjuti	118 Proposal	0	0	0	0.00%	18	18	15.25%	
		Jumlah proposal permohonan hibah sarana/prasarana pendidikan keagamaan yang ditindaklanjuti	79 Proposal	0	0	0	0.00%	39	39	49.37%	
		Jumlah lembaga yang difasilitasi, diverifikasi, dan dimonitoring, dievaluasi serta diberi rekomendasi terkait permohonan hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat sosial	10 Lembaga / Badan	0	2 Lembaga / Badan	2	100.00%	2	4	40.00%	
		Jumlah peserta pelatihan da'i desa/kelurahan	670 Da'i Desa/Kel	0	0	0	0.00%	134 Da'i Desa/Kel	134	20.00%	

		Jumlah pembinaan Da'i Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	604 Da'i Desa/Kel	0	134 Da'i Desa/Kel	110	82.09%	134 Da'l Desa/Kel	244	40.40%	
		Jumlah guru minggu yang diberikan intensif pembinaan	1000 Orang	0	200 Orang	100	50.00%	200	300	30.00%	
		Jumlah guru agama, imam, mudim dan guru ngaji, khatib dan bilal yang diberi pembinaan	32135 Orang	0	3545 Orang	5349	150.89%	5045	10394	32.34%	
		Jumlah pelaksanaan festival anak sholeh tingkat kabupaten dan tingkat provinsi	10 Kali	0	2 Kali	2	100.00%	2	4	40.00%	
		Jumlah fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dan pengiriman TKHD	10 kali fasilitasi	0	2 kali fasilitasi	2	0.00%	2	4	40.00%	
'4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi serta pertemuan forum tim pembina UKS tingkat kabupaten	10 Kali Rapat	0	2 Kali Rapat	2	100.00%	2	4	40.00%	
		Jumlah fasilitasi koordinasi terkait kerukunan umat beragama	8 Fasilitasi	0	0	0	0.00%	2	2	25.00%	
		Jumlah penyelesaian proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat	1653 pasang	0	653 pasang	556	85.15%	200	756	45.74%	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan amaliya ramadhan dua hari raya di 13 kecamatan	25 Kali	0	5 Kali	5	100.00%	5	10	40.00%	

Sasaran : Meningkatkan penataan produk hukum daerah

'4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang dindangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	500%	0%	100%	100%	100.00%	100%	200%	40.00%	Bagian Hukum
'4.01.02.2.03.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang diundangkan	60 Perda	0	12 Perda	15	125.00%	12	27	45.00%	
		Jumlah Perbup yang diundangkan	250 Perbup	0	50 Perbup	34	68.00%	30	64	25.60%	
		Jumlah SK yang diterbitkan	5000 SK	0	1000 SK	846	84.60%	1000	1846	36.92%	
'4.01.02.2.03.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	10 Perkara	0	3 Perkara	3	100.00%	2	5	30.00%	
		Jumlah Laporan Aksi HAM	20 Lap.Aksi HAM	0	4 Lap.Aksi HAM	8	200.00%	4 Lap.Aksi HAM	12	60.00%	
		Jumlah Laporan Kadarkum	5 Laporan Kadarkum	0	1 Laporan Kadarkum	1	100.00%	1	2	40.00%	
'4.01.02.2.03.03	Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Koordinasi dan konsultasi penetapan raperda (Harmonisasi)	20 Kali	0	4 Kali	15	375.00%	4	19	95.00%	
		Jumlah Laporan SJDIDH	5 Laporan SJDIDH	0	1 Laporan SJDIDH	1	100.00%	1	2	40.00%	
		Jumlah perda dan himpunan perda Desa/Kel. Yang mendapatkan penyuluhan hukum	3.500 Perda 42 Desa/Kel	0	600 Buku Perda 12 Desa/Kel	700 Buku 12 Desa/Kel	116.67%	1.500 Perda 6 Desa/Kel	2200 Buku 18 Desa/Kel	20.00%	

Sasaran : Meningkatnya Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri											
'4.01.02.2.04	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi	500%	0%	100%	100%	100.00%	100%	200%	40.00%	Bagian Kerjasama
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan dalam negeri yang difasilitasi	167 Dok	0	67	67	100.00%	107	174	104.19%	
'4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan luar negeri yang difasilitasi	18 Dok	0	3	3	100.00%	6	9	16.67%	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi kerjasama yang difasilitasi	185 Dok	0	70	70	100.00%	113	183	98.92%	
Sasaran : Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah											
'4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	500%	0%	100%	93.94%	93.94%	100.00%	193.94%	38.79%	Bagian Perekonomian
'4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan	500%	0%	100%	93.94%	93.94%	100.00%	193.94%	38.79%	
'4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang diberikan penyertaan modal (PT.BPR Tanggo Rajo, PT Tanjab Sakti, BPD)	20 BUMD	0	3 BUMD	1	33.33%	3	4	20.00%	
		Jumlah BUMD yang diberikan Subsidi (PDAM Tirta Pengabuan)	5 BUMD	0	1 BUMD	1	100.00%	1	2	20.00%	
		Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD)	5 laporan	0	1 laporan	1	100.00%	1	2	40.00%	
		Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD	20 kali	0	4 kali	4	100.00%	4	8	40.00%	
'4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan distribusi perekonomian daerah	20 Kali	0	4 kali	4	100.00%	4	8	40.00%	
		Jumlah laporan sembako	60 Laporan	0	12 Laporan	12	100.00%	12	24	40.00%	
		Jumlah laporan TPID	20 Laporan	0	4 Laporan	4	100.00%	4	8	40.00%	
'4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah laporan KUPEM	60 Laporan	0	12 laporan	12	100.00%	12	12	20.00%	
		Jumlah laporan Pupuk	20 Laporan	0	4 laporan	4	100.00%	4	8	40.00%	
		Jumlah monitoring dan pembinaan KUPEM	20 Kali	0	4 kali	4	100.00%	4	8	40.00%	
		Jumlah monitoring penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran	20 Kali	0	4 kali	4	100.00%	4	8	40.00%	



Sasaran : Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah											
'4.01.03.2.02	Kegiatan Administrasi Pembangunan	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	500%	0%	100%	75%	75.00%	100%	175%	35%	Bagian ADP
'4.01.03.2.02.01	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tanjab Barat	5 Dokumen	0	1	1	100.00%	1	2	40.00%	
		Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tanjab Barat	60 bulan	0	12	12	100.00%	12	24	40.00%	
'4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring	20 kali	0	4 kali	3	75.00%	4	7	15.00%	
'4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD	60 Laporan	0	12 Laporan	12	100.00%	12	24	40.00%	
		Jumlah pelaporan laporan tepra sismonteptra	60 Laporan	0	12 Laporan	12	100.00%	12	24	20.00%	
Sasaran : Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah											
'4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	500%	0.00%	100%	165%	165.00%	100%	265%	53.00%	Bagian PBJ
'4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	770 Paket	0	150	248	165.33%	150	398	32.21%	
		Jumlah paket lelang yang dilaksanakan tepat waktu dan tuntas	770 Paket	0	150	248	165.33%	150	398	32.21%	
'4.01.03.2.03.02	'Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah OPD yang menyampaikan RUP tepat Waktu	220 OPD	0	44	44	100.00%	44	88	20.00%	
		Jumlah pemeliharaan Co. Location	5 unit	0	1	1	100.00%	1	2	20.00%	
		Jumlah server yang dilakukan Pengecekan dan servis berkala	6 Server	0	2	2	100.00%	1	3	30.00%	
'4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta sosialisasi	288 Peserta	0	84	0	0.00%	50	50	59.52%	
		Jumlah peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar	204 Peserta	0	84	0	0.00%	30	30	35.71%	

Sasaran : Meningkatnya koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif

'4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	400%	0	80%	80%	100.00%	80%	160%	40.00%	Bagian SDA
'4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan monitoring bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan	78 kali	0	13 kali	13	100.00%	13	26	33.33%	
		Jumlah Dokumen Laporan evaluasi	5 Dokumen	0	1 Dokumen	1	100.00%	1	2	40.00%	
'4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Pertambangan dan lingkungan hidup	25 kali	0	5 kali	5	100.00%	5	10	40.00%	
		Jumlah Laporan evaluasi	5 Laporan	0	1 Laporan	1	100.00%	1	2	40.00%	
'4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Energi dan Air	25 kali	0	5 kali	5	100.00%	5	10	40.00%	
		Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi	5 Dokumen	0	1 Dokumen	1	100.00%	1	2	40.00%	

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan tingkat realisasi kinerja yang dituangkan dalam rencana kerja perangkat daerah tahun 2021 dapat terealisasi dengan rata-rata 99,10 % dengan predikat sangat memuaskan.

Berikut pengukuran kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 didasarkan pada per sasaran strategis dengan capaian sebagaimana tabel berikut:

**Rekapitulas Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021**  
**Per sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Tujuan Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Penanggung Jawab
1. Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab	1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	- Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	100%	Bag. Renkeu
		- Nilai/Katagori SAKIP Perangkat Daerah	>60,39 (B)	>60,39 (B)	100%	
		- Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	100%	100%	100%	Bagian Umum
		- Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	100%	100%	100%	
	1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	- Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran, tepat fungsi	100%	73.11%	73.1100%	Bag. Organisasi
		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	84.61%	105.76%	
		- Nilai AKIP Kabupaten	100%	91.11%	91.1100%	
	1.3. Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	- Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	100%	100%	Bag. Protokoler

2. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah	2.1 Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	- Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	100%	100%	Bag. Tapem
		- Skor LPPD	3<ST<4			
	2.2 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	- Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Bag. Kesra
	2.3 Meningkatkan penataan produk hukum daerah	- Persentase Produk Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	100%	100%	Bag. Hukum
	2.4 Meningkatkan Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	- Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	Bag. Kerjasama
	2.5 Meningkatkan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	- Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	100%	93.94%	94%	Bag. Perekonomian
	2.6 Meningkatkan Akses Informasi Pembangunan Daerah	- Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	75%	75%	Bag. ADP
		- Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	100%	165%	165%	Bag. PBJ
2.7 Meningkatkan koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	- Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	80%	80%	100%	Bag. SDA	

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 per sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan **“Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab”** didukung oleh 3 (Tiga) sasaran Strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung yang terdiri atas 4 (empat) indikator pengukuran kinerja dengan masing-masing capaian kinerja sebagai berikut :
  - a. Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu, capaian kinerja 100 persesn sesuai dengan target
  - b. Nilai/Katagori SAKIP Perangkat Daerah, target tercapai dengan katagori B atau nilai 60,39.
  - c. Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat, target kinerja tercapai sesuai dengan target yaitu 100 persen.
  - d. Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH, capaian kinerja 100 persen, tercapai sesuai target
2. Sasaran Menigkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif, terdiri atas 3 indikator kinerja yaitu :
  - a. Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran, tepat fungsi dengan target kinerja 100 persen, tercapai 73,11 persen.
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target kinerja 80 persen sedangkan capaian kinerja sebesar 84, 61 Persen.
  - c. Nilai AKIP Kabupaten, target kinerja 100 persen sedangkan capaian kinerja 91,11 persen
3. Sasaran Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi, capaian kinerja 100 persen tercapai sesuai target.

Tujuan **“Meningkatkan kualiatas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah”** didukung 7 (tujuh) sasaran strategis dengan indikaktor kinerja sebanyak 8 (delapan) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah dibagi atas 2 (dua) indikator Kinerja yaitu :
  - a. Persentase keterisian data IKK LPPD, target kinerja tercapai sebesar 100 persen sesuai target.

- b. Skor LPPD, dengan target  $3 < ST < 4$  katagori (sangat tinggi) belum tergambar realisasinya karena menunggu penilaian dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat dengan indikator kinerja Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan, capaian kinerja sebesar 100 persen tercapai sesuai target.
3. Sasaran Meningkatnya penataan produk hukum daerah, indikator kinerja Persentase Produk Hukum Daerah yang di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, target kinerja tercapai 100 persen sesuai dengan target.
4. Sasaran Meningkatnya Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri, indikator kinerja Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang Terasilitasi tercapai 100 persen sesuai dengan target.
5. Sasaran Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah, indikator kinerja Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan, target kinerja tercapai 100 persen, tingkat realisasi kinerja 94 persen.
6. Sasaran Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah, target 100 persen dengan capaian target kinerja sebesar 75 persen.
  - b. Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu, realisasi target capaian kinerja sebesar 165 persen, terjadi over target sebesar 65 persen dari target 100 persen.
7. Sasaran Meningkatnya koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif, indikator kinerja Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif, trget tercapai 80 persen sesuai dengan target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan hampir semua indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur pencapaian target kerja tercapai dengan rata-rata capaian kinerja 100 persen.

Sedangkan secara program dan pertanggungjawaban per bagaian, realisasi keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program dan Per Bagian Tahun 2021

Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Anggaran dan Realisasi Anggaran Progam Tahun 2021			Sisa Pagu Anggaran dan Efesinsi Anggaran		Bagian yang Bertanggung jawab
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	Sisa Pagu Anggaran (Rp)	% Efesinsi Anggaran (Rp)	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7,383,088,000	5,021,669,096	68.02%	2,361,418,904	31.98%	Bag. Renkeu
		20,494,976,861	15,981,058,096	77.98%	4,513,918,765	22.02%	Bag. Umum
		403,997,473	317,109,256	78.49%	86,888,217	21.51%	Bag. Organisasi
		2,259,948,678	2,255,473,900	99.80%	4,474,778	0.20%	Bag. Prtokopim
<b>Jumlah</b>		<b>30,542,011,012</b>	<b>23,575,310,348</b>	<b>77.19%</b>	<b>6,966,700,664</b>	<b>22.81%</b>	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	662,687,795	492,754,235	74.36%	169,933,560	25.64%	Bag. Tapem
		8,339,359,383	7,186,648,268	86.18%	1,152,711,115	13.82%	Bag. Kesra
		1,006,597,269	990,564,269	98.41%	16,033,000	1.59%	Bag. Hukum
		570,593,968	449,448,700	78.77%	121,145,268	21.23%	Bag. Kerjasama
<b>Jumlah</b>		<b>10,579,238,415</b>	<b>9,119,415,472</b>	<b>86.20%</b>	<b>1,459,822,943</b>	<b>13,80%</b>	



4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	7,277,477,298	7,219,877,298	99.21%	57,600,000	0.79%	Bag. Perekonomian
		305,663,400	252,818,400	82.71%	52,845,000	17.29%	Bag. ADP
		587,150,288	427,620,000	72.83%	159,530,288	27.17%	Bag. PBJ
		638,758,700	582,428,700	91.18%	56,330,000	8.82%	Bag. SDA
<b>Jumlah</b>		<b>8,809,049,686</b>	<b>8,482,744,398</b>	<b>96.30%</b>	<b>326,305,288</b>	<b>3.70%</b>	
<b>Jumlah Total</b>		<b>49,930,299,113</b>	<b>41,177,470,218</b>	<b>82.47%</b>	<b>8,752,828,895</b>	<b>17.53%</b>	

Sumber Data : LPPK Desember 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 melaksanakan 3 (Tiga) Program dengan total anggaran sebesar Rp. 49.930.299.113,- belum termasuk gaji dan tunjangan ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.177.470.218 atau 82,47% dan ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.752.828.895,- atau 17,53%.

Adapun 3 (Tiga) program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.542.011.012 atau 61,17 % dari total anggaran, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.575.310.348 atau 77,19 % serta efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.966.700.664,- atau 22,81 %, program ini merupakan program non urusan yang dilaksanakan oleh 4 (empat) bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu : 1) Bagian Umum, 2) Bagian Perencanaan dan Keuangan, 3) Bagian Organisasi dan 4) Bagian Protokol dan KOMunikasi Pimpinan.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.579.238.415,- atau 21,19% dari total anggaran, realisasi anggaran sebesar Rp. 9.119.415.472,- atau 86,20% dan ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.459.822.943 atau 13,80%. Program ini merupakan program urusan sekretariat yang dilaksanakan oleh 4 (empat) bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu : 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 3) Bagian Hukum dan 4) Bagian Kerjasama.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan, jumlah anggaran sebesar Rp. 8.809.049.686,- atau 17,64% dari total anggaran, realisasi anggaran sebesar Rp. 8.482.744.398,- atau 96,30% dan efisiensi anggaran sebesar Rp. 326.305.288,- atau 3,70%. Program ini juga dilaksanakan oleh 4 (empat) bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu : 1) Bagian Perekonomian, 2) Bagian Administrasi Pembangunan, 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan 4) Bagian Sumber Daya Alam.

Pelaksanaan Renja pada tahun 2021, dari semua indikator kinerja kegiatan semaksimal mungkin untuk dapat dicapai, hal ini berkaitan dengan dana dan jenis kegiatan yang dapat dikerjakan dalam tahun bersangkutan. Indikator kinerja kegiatan hanya dapat diukur bila dalam tahun tersebut terdapat kegiatan atau hal-hal lain yang menimbulkan pencapaian indikator kinerja kegiatan. Selain itu untuk dapat diukur, target indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dimasukkan ke dalam rencana kinerja. Hasil pengukuran indikator kinerja kegiatan akan menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan tahun 2021 disusun

atau diperoleh berdasarkan output dan outcome dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam tahun bersangkutan.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian indikator output untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 telah dilakukan pula efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya telah dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Evaluasi dimaksud dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, tidak saja terhadap penyebab terjadinya gap akan tetapi juga pada strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2021 merupakan gambaran dari Penentuan Renja pada tahun 2023 serta pencapaian Renstra dari perangkat daerah itu sendiri. Ada beberapa indikator yang tidak termuat dalam anggaran tahun 2021, maka Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target dan indikator pada tahun 2023.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Dengan rumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diminimalisir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesenjangan berkaitan kondisi ideal organisasi Sekretariat

Daerah yang diharapkan dengan kendala yang dinilai saat ini belum terpenuhi dapat diproyeksikan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh Sekretariat Daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif.
2. Tersedianya kerangka gerak berupa pedoman yang terstandarisasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat regulasi (regulation), pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowering) dengan ditunjang oleh pelayanan administrasi pemerintahan yang baik.
3. Pelaksanaan kewenangan, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan secara efektif dengan adanya proses penataan organisasi pemerintahan yang lebih proporsional, efektif dan efisien sesuai kebutuhan secara obyektif.
4. Kinerja aparatur pemerintah daerah mengarah pada profesionalitas diberbagai bidang yang terlihat dan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja akan lebih optimal dan berorientasi pada pencapaian tujuan.
5. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara esensial menunjang pada implementasi pelaksanaan otonomi daerah dengan membuka ruang partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh budaya budaya kerja yang tinggi.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel
2. Tata kelola administrasi pertanahan belum optimal

3. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya
4. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan
5. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
6. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis
7. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru
8. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah
9. Belum optimalnya penyerapan PAD
10. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan
11. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien
12. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati
13. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah
14. Penyelenggaraan yang harus sesuai dengan standar keprotokolan

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Batas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengari kabupaten lain sekitarnya masih belum jelas sehingga berpengaruh pada administrasi masyarakat
4. Pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu dijamin oleh pemerintah
5. Adanya peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
6. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa
7. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal
8. Belum semua perangkat daerah memahami mekanisme kerjasama daerah

9. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal
10. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM
  
11. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati
12. Pengelolaan aset yang belum optimal
13. Belum optimalnya standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh perangkat daerah
14. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan belum optimal

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:





**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode Rekening	RANCANGAN AWAL RENJA 2023					HASIL ANALISIS KENUTUHAN					Penanggung jawab
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program, Kegiatan, Sub kegiatan	lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program, Kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Tanjab Barat	100%	36,775,494,459	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Tanjab Barat	100%	37,277,445,209	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Tanjab Barat	100%	493,531,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Tanjab Barat	100%	666,476,000	
		Nilai AKIP Perangkat Daerah Setda	Kab. Tanjab Barat	65,45 (B)			Nilai AKIP Perangkat Daerah Setda		65,45 (B)		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bagian Setda yang diselaraskan	Kab. Tanjab Barat	10 Dokumen	110,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanjab Barat	4 Dokumen	245,191,000	
		Jumlah dokumen perencanaan setda yang disusun sesuai dengan aturan dan tepat waktu		10 Dokumen							
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	Kab. Tanjab Barat	1 Dok	105,325,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	105,325,000	

4.01.01 2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan SKPD	Kab. Tanjab Barat	1 Dok	94,435,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	94,435,000
4.01.01 2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Renstra, Dokumen Laporan Pelaksanaan Renja, Dokumen Laporan IKU, Dokumen Laporan Rencana Aksi,	Kab. Tanjab Barat	6 Dok	102,256,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tanjab Barat	5 Dokumen	140,510,000
4.01.01 2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja SKPD, Dokumen LAIKP dan Dokumen Laporan LKPJ	Kab. Tanjab Barat	3 Dok	81,015,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjab Barat	2 Dokumen	81,015,000
4.01.01 2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	100%	<b>26,355,996,839</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>26,465,661,839</b>
4.01.01 2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	24,819,911,839	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanjab Barat	132 Orang/Bulan	24,819,911,839
4.01.01 2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	Kab. Tanjab Barat	63 orang	1,375,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	1,375,000,000
4.01.01 2.02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD	Kab. Tanjab Barat	2 laporan	80,150,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	175,500,000
		Jumlah dokumen laporan keuangan		2 Dok						
4.01.01 2.02.0 8	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	80,935,000	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tanjab Barat	2 Dokumen	95,250,000
		Jumlah dokumen pelaporan setda		4 Dokumen						

4.01.01 .2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Konsultasi yang diklaksanakan</b>		100%	8,179,948,480	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Konsultasi yang diklaksanakan</b>		100%	8,179,948,480
4.01.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	8,179,948,480	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanjab Barat	12 Laporan	8,179,948,480
4.01.01 .2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>1,640,233,890</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia</b>		<b>100%</b>	<b>1,790,233,890</b>
4.01.01 .2.11.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	1,171,084,210	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanjab Barat	2 Orang/Bulan	1,171,084,210
4.01.01 .2.11.0 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	41,149,680	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	6 Paket	81,149,680
4.01.01 .2.11.0 3						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanjab Barat	2 Orang	110,000,000
4.01.01 .2.11.0 4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	428,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanjab Barat	2 Orang/Bulan	428,000,000
4.02.01 .2.03	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>Persentase BMD terkelola dengan baik</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>105,784,250</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>Persentase BMD terkelola dengan baik</b>		<b>100%</b>	<b>175,125,000</b>
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD OPD yang terkelola	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	1.157 BMD	105,784,250	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tanjab Barat	2 Laporan	175,125,000

4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	Kab. Tanjab Barat	100%	17,687,667,452	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat		100%	26,320,820,879	Bagian Umum
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)	Kab. Tanjab Barat	80,80			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)		81,00		
4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	Kab. Tanjab Barat	100%	898,289,800	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN		100%	960,152,100	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	556 stel	736,485,300	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tanjab Barat	5 Paket	736,485,300	
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitas Koordinasi Kegiatan Staf Ahli	Kab. Tanjab Barat	3 Staf Ahli	61,804,500	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Tanjab Barat	3 Dokumen	88,666,800	
		Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang di Jalankan		2 Aplikasi							
		Jumlah Waktu Fasilitas Makanan dan Minuman Staf Ahli		12 Bulan							
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan/Pelatihan yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	15 Orang	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tanjab Barat	27 Orang	135,000,000	
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	2,347,284,124	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum		12 Bulan	4,368,575,251	
4.01.01.2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	316,320,252	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 Paket	932,640,504	
		Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		12 Bulan							

"4.01.0 1.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) yang Tersedia	Kab. Tanjab Barat	11 Jenis/Item	547,013,783	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	2 Paket	947,013,783	Bagian Umum
"4.01.01 2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Kab. Tanjab Barat	60 Jenis/Item	95,021,520	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	3 Paket	395,021,520	
"4.01.01 2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik (alat dan bahan pembersih/kebersihan)kantor	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	256,737,800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 Paket	831,708,675	
		Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor		12 Bulan							
"4.01.01 2.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (Blangko, Formulir, Buku, Map) dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	7 Jenis/Item	109,132,469	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	2 Paket	239,132,469	
"4.01.01 2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu kunjungan tamu yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	1,023,058,300	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	1,023,058,300	
4.01.01 2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>2,576,581,010</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH</b>		<b>100%</b>	<b>6,176,581,010</b>	
"4.01.01 2.07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan yang Tersedia	Kab. Tanjab Barat	13 Unit	1,716,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	12 Unit	4,716,000,000	
"4.01.01 2.07.0 2	Pengadaan Mebel	- Jumlah Waktu Pengadaan Mebel yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	211,103,200	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	2 Pakett	411,103,200	
"4.01.01 2.07.0 6	Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	35 Jenis/Item	649,477,810	Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	50 Unit	1,049,477,810	
4.01.01 2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>4,596,405,000</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>4,946,405,000</b>	

'4.01.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Pendistribusian dan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Setda	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	510,207,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanjab Barat	2 Laporan	610,207,500
'4.01.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Beban Pemakaian Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet/TV Berlangganan	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	1,999,800,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	1,999,800,000
		Jumlah Waktu Penyediaan Beban Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan		1 Tahun						
		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan						
'4.01.01 .2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	370,397,500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	420,397,500
'4.01.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Kab. Tanjab Barat	45 Jenis/Item	1,716,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	1,916,000,000
		Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Kebersihan) Kantor		12 Bulan						
4.01.01 .2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>5,788,385,900</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>100%</b>	<b>7,388,385,900</b>
'4.01.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Kab. Tanjab Barat	88 Unit	2,988,885,900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Tanjab Barat	125 Unit	3,488,885,900
		Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan (Tenaga Supir) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		12 Bulan						
'4.01.01 .2.09.0 5	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah Waktu Pemeliharaan Mebel	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	70,180,000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Tanjab Barat	313 Unit	70,180,000

'4.01.01 2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	865,881,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tanjab Barat	600 Unit	965,881,500	
'4.01.01 2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Kab. Tanjab Barat	1 Gedung	1,863,438,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tanjab Barat	15 Unit	2,863,438,500	
		Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara/Rehabilitasi		3 Bangunan							
4.01.01 2.12	<b>Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>1,480,721,618</b>	<b>Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia</b>		<b>100%</b>	<b>2,480,721,618</b>	
04.01.0 1.2.12. 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	844,110,222	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	3 Paket	1,244,110,222	
04.01.0 1.2.12. 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	479,751,889	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	3 Paket	779,751,889	
04.01.0 1.2.12. 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	156,859,507	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	3 Paket	456,859,507	
4.01.01 2.13	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>Nilai Kematangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Tanjab Barat	32	<b>1,309,000,000</b>	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>Nilai Kematangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Tanjab Barat	32	<b>1,309,000,000</b>	Bagian Organisasi
		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>		80.7			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>		80.7		
		<b>Nilai AKIP Kabupaten</b>		>61,50			<b>Nilai AKIP Kabupaten</b>		>61,50		
'4.01.01 2.13.0 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah regulasi kelembagaan	Kab. Tanjab Barat	3 regulasi	412,500,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	412,500,000	
		Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja		1 Dokumen							
		Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan		1 Dokumen							

'4.01.01 .2.13.0 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SOP	Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	511,500,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tanjung Barat	1 Laporan	511,500,000	
		Jumlah Laporan Inovasi Pelayanan Publik		1 Laporan							
		Jumlah OPD yg dilakukan survey IKM		44 OPD							
		Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan		1 regulasi							
'4.01.01 .2.13.0 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)	Kab. Tanjung Barat	1 Laporan	385,000,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	385,000,000	
		Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi		1 Laporan							
4.01.01 .2.14	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi</b>	Kab. Tanjung Barat	100%	1,773,923,603	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi</b>		100%	1,773,923,603	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
'4.01.01 .2.14.0 1	Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi kegiatan pimpinan daerah yang dilakukan secara keprotokolan	Kab. Tanjung Barat	12 Bulan	526,871,760	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Tanjung Barat	1 Laporan	526,871,760	
		Jumlah dokumen kegiatan keprotokolan		1 Dokumen							
'4.01.01 .2.14.0 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Frekuensi pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah	Kab. Tanjung Barat	-	702,300,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Tanjung Barat	1 Laporan	702,300,000	
		Jumlah media jurnal/surat kabar yang dilakukan kerjasama peliputan kegiatan pimpinan daerah		-							
		Frekuensi pengelolaan dokumen laporan kegiatan pimpinan		12 Buah							
		Jumlah bahan bacaan pimpinan Sekretariat Daerah		40000 Exp							



'4.01.01 .2.14.0 3	Pendokumentasi Tugas Pimpinanan	Frekuensi jasa penayangan dokumentasi cetak dan digital kegiatan pimpinan	Kab. Tanjab Barat		544,751,843	Pendokumentasi Tugas Pimpinanan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	544,751,843	
		Frekuensi sewa billboard area bandara									
		Frekuensi pengelolaan data dokumentasi kegiatan pimpinan		12 Bulan							
		Jumlah dokumen kegiatan pendokumentasian		1 Dokumen							
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase keterisian data IKK LPPD	Kab. Tanjab Barat	100%	17,653,900,000	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase keterisian data IKK LPPD		100%	17,653,900,000	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02 .2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Skorr LPPD	Kab. Tanjab Barat	3<ST<4	1,571,900,000	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Skorr LPPD		3<ST<4	1,571,900,000	
'4.01.02 .2.01.0 1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	575,900,000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Tanjab Barat	4 Dokumen	575,900,000	
		Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal		1 Laporan							
		Jumlah Pelaksanaan Event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan		2 Event (HUT RI & Hari Jadi Kab.							
		Cakupan wilayah monitoring kesiapan tahapan Pemilu, Pilkada dan Pilpres									
'4.01.02 .2.01.0 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Pembuatan nama Rupabumi	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	525,500,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Tanjab Barat	2 Dokumen	525,500,000	
		Jumlah Tanda Batas Kabupaten		4 Tanda							
		Jumlah tanda batas Kecamatan		8 Tanda							

'4.01.02 .2.01.0 3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian camat teladan	Kab. Tanjab Barat	13 Kecamatan	470,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Tanjab Barat	3 Dokumen	470,500,000	
		Jumlah Rapat Koordinasi camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat		1 Kali Rakor							
		Jumlah laporan pengawsan pelaksanaan PATEN		1 Laporan							
		Jumlah monitoring pelaksanaan perencanaan, penganggaran perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yg baik tingkat kelurahan		2 Laporan							
'4.01.02 .2.02	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>13,816,000,000</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>13,816,000,000</b>	
'4.01.02 .2.02.0 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten dilaksanakan	Kab. Tanjab Barat	26 Cabang Lomba	9,317,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Tanjab Barat	8 Dokumen	9,317,000,000	Bagian KESRA
		Jumlah cabang lomba musyabaqah tilawatil qur'an (MTQ) tingkat provinsi yang diikuti		26 Cabang Lomba							
		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan		6 Kali Peringatan Hari Besar							
		Jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an yang dilaksanakan		3 Kali Pembinaan							
		Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ		5 Kali Tahapan							
		Jumlah Peserta pelatihan takmir Masjid		50 Orang							
		Jumlah Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Safari Subuh dan Jum'at		48 Fasilitasi							

4.01.02 .2.02.0 2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah proposal permohonan hibah sarana/prasarana rumah ibadah yang ditindaklanjuti	Kab. Tanjab Barat	25 Proposal	3,916,000,000	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Tanjab Barat	9 Dokumen	3,916,000,000
		Jumlah proposal permohonan hibah sarana/prasarana pendidikan keagamaan yang ditindak lanjuti		10 Proposal						
		Jumlah lembaga yang difasilitasi, diverifikasi, dan dimonitoring, dievaluasi serta diberi rekomendasi terkait permohonan hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat sosial		2 Lembaga / Badan						
		Jumlah peserta pelatihan da'i desa/kelurahan		134 Da'i Desa/Kel						
		Jumlah pembinaan Da'i Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat		134 Da'i Desa/Kel						
		Jumlah guru minggu yang diberikan intensif pembinaan		200 Orang						
		Jumlah guru agama, imam, mudim dan guru ngaji, khatib dan bilal yang diberi pembinaan		5545 Orang						
		Jumlah pelaksanaan festival anak sholeh tingkat kabupaten dan tingkat provinsi		2 Kali						
		Jumlah fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dan pengiriman TKHD		2 kali fasilitasi						

'4.01.02 .2.02.0 3	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi serta pertemuan forum tim pembina UKS tingkat kabupaten	Kab. Tanjab Barat	2 Kali Rapat	583,000,000	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Tanjab Bara	4 Dokumen	583,000,000	
		Jumlah fasilitasi koordinasi terkait kerukunan umat beragama		2 Fasilitasi							
		Jumlah penyelesaian proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat		200 pasang							
		Jumlah pelaksanaan kegiatan amaliya ramadhan dua hari raya di 13 kecamatan		5 Kali							
4.01.02 .2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang dindangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</b>	Kab. Tanjab Barat	100%	1,381,000,000	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang dindangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</b>		100%	1,381,000,000	Bagian Hukum
'4.01.02 .2.03.0 1	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang diundangkan	Kab. Tanjab Barat	12 Perda	501,000,000	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Tanjab Bara	4 Dokumen	501,000,000	
		Jumlah Perbup yang diundangkan		40 Perbup							
		Jumlah SK yang diterbitkan		1000 SK							
'4.01.02 .2.03.0 2	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	Kab. Tanjab Barat	2 Perkara	425,000,000	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Tanjab Bara	2 Kasus	425,000,000	
		Jumlah Laporan Aksi HAM		4 Lap. Aksi HAM							
		Jumlah Laporan Kadarkum		1 Laporan Kadarkum							
'4.01.02 .2.03.0 3	Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Koordinasi dan konsultasi penetapan raperda (Harmonisasi)	Kab. Tanjab Barat	4 Kali	455,000,000	Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Tanjab Barat	5 Dokumen	455,000,000	
		Jumlah Laporan SJDIDH		1 Laporan SJDIDH							
		Jumlah perda dan himpunan perda Desa/Kel. Yang mendapatkan penyuluhan hukum		2.000 Perda 6 Desa/Kel							

4.01.02 2.04	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	100%	885,000,000	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi</b>		100%	885,000,000	Bagian Kerjasama
4.01.02 2.04.0 1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan dalam negeri yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	147 Dok	380,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Tanjab Barat	3 Dokumen	380,000,000	
4.01.02 2.04.0 2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan luar negeri yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	9 Dok	320,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Tanjab Barat	2 Dokumen	320,000,000	
4.01.02 2.04.0 3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi kerjasama yang difasilitasi	Kab. Tanjab Barat	156 Dok	185,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Tanjab Barat	5 Laporan	185,000,000	
4.01.03	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	100%	43,110,870,000	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan</b>		100%	43,110,870,000	Bagian Perekonminian
4.01.03 2.01	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	100%	39,175,000,000	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan</b>		100%	39,175,000,000	
4.01.03 2.01.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang diberikan penyertaan modal (PT.BPR Tanggo Rajo, PT Tanjab Sakti, BPD)	Kab. Tanjab Barat	4 BUMD	38,725,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Tanjab Barat	2 Dokumen	37,725,000,000	
	Jumlah BUMD yang diberikan Subsidi ( PDAM Tirta Pengabuan)	1 BUMD									
	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD)	1 laporan									
	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD	4 kali									

'4.01.03 .2.01.0 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan distribusi perekonomian daerah	Kab. Tanjab Barat	4 kali	225,000,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Tanjab Barat	2 Laporan	225,000,000	
		Jumlah dokumen laporan sembako		12 Dok							
		Jumlah dokumen laporan TPID		5 Dok							
'4.01.03 .2.01.0 3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah laporan KUPEM	Kab. Tanjab Barat	12 Laporan	225,000,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Tanjab Barat	2 Dokumen	225,000,000	
		Jumlah laporan Pupuk		4 Laporan							
		Jumlah monitoring dan pembinaan KUPEM		4 Kali							
		Jumlah monitoring penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran		4 Kali							
4.1.3.2 01.4						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	500,000,000	
4.1.3.2 01.5						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	500,000,000	
4.01.03 .2.02	<b>Kegiatan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>632,500,000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>632,500,000</b>	
'4.01.03 .2.02.0 1	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	275,000,000	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	275,000,000	Bagian ADP
		Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tanjab Barat		12 bulan							

'4.01.03 .2.02.0 2	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring	Kab. Tanjab Barat	4 kali	165,000,000	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	165,000,000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
'4.01.03 .2.02.0 3	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD	Kab. Tanjab Barat	12 Laporan	192,500,000	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	192,500,000	
		Jumlah pelaporan laporan tepra sismonteptra		12 Laporan							
4.01.03 .2.03	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>2,626,870,000</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas</b>		<b>100%</b>	<b>2,626,870,000</b>	
'4.01.03 .2.03.0 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	Kab. Tanjab Barat	150 Paket	1,675,070,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanjab Barat	150 Dokumen	1,675,070,000	
		Jumlah paket lelang yang dilaksanakan tepat waktu dan tuntas		150 Paket							
'4.01.03 .2.03.0 2	'Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah OPD yang menyampaikan RUP tepat Waktu	Kab. Tanjab Barat	44 OPD	600,000,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Tanjab Barat	44 Dokumen	600,000,000	
		Jumlah pemeliharaan Co. Location		1 unit							
		Jumlah server yang dilakukan Pengecekan dan servis berkala		1 unit							
'4.01.03 .2.03.0 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta sosialisasi	Kab. Tanjab Barat	50 Peserta	351,800,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanjab Barat	80 Orang	351,800,000	
		Jumlah peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar		30 Peserta							

4.01.03 .2.04	Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	Kab. Tanjab Barat	80%	676,500,000	Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam			80%	676,500,000	Bagian SDA
4.01.03 .2.04.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan monitoring bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan	Kab. Tanjab Barat	13 kali	346,500,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	346,500,000	
		Jumlah Dokumen Laporan evaluasi		1 Dokumen							
4.01.03 .2.04.0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Pertambangan dan lingkungan hidup	Kab. Tanjab Barat	5 kali	165,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	165,000,000	
		Jumlah Laporan evaluasi		1 Dokumen							
4.01.03 .2.04.0 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Energi dan Air	Kab. Tanjab Barat	5 kali	165,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	165,000,000	
		Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi		1 Dokumen							
Jumlah Total					118,310,855,514					127,445,959,691	



Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisis terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 seluruh indikator kinerja dan satuan target kinerja dari sub kegiatan mengalami perubahan.

Adanya perubahan ini diakibatkan oleh penerapan dan implementasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah. Implementasi dari Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 juga mengakibatkan perubahan/penambahan sub kegiatan pada beberapa kegiatan serta perubahan/penambahan terhadap pagu/nilai anggaran sub kegiatan, hal ini diakibatkan oleh perhitungan berdasarkan kebutuhan.

## **2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat**

Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dan kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi -asosiasi maupun dan unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PROGAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (PD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Agenda reformasi birokrasi yang mencakup 8 area perubahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, "mind set and culture" masih belum terlaksana dengan baik.
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan.

Pada Program Pembinaan Nasional tercantum Visi Pembangunan Nasional yaitu ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Sementara itu Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didasarkan pada Visi Pembangunan Nasional yang tercantum pada pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021–2026 adalah ***“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”***.

Adapun Makna yang terkandung dalam **Visi** tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- **Berkualitas** adalah Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.
- **Ekonomi maju** adalah meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- **Religius** adalah berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.
- **Kompetitif** adalah mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumber daya unggulan daerah.
- **Aman** adalah suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya aman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.
- **Harmonis** adalah terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Berdasarkan Misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggaris bawahi misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 pada point 3 (tiga) yaitu ***“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik”***

Dari misi point 3 (Tiga) tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya untuk menjalankan Misi tersebut dengan baik, akan tetapi untuk menjalankan Misi tersebut tidaklah mudah, berbagai permasalahan dalam menjalankan program pasti ada.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yaitu : **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. Adapun Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab
2. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan Sasaran adalah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan beberapa sasaran yang akan dicapai, antara lain sebagai berikut

1. Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah
2. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat
3. Meningkatnya penataan produk hukum daerah
4. Meningkatnya Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri
5. Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah
6. Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah
7. Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah
8. Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif
10. Meningkatnya pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah.

**Tabel : 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja**  
**Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2023**

Visi Kepala Daerah	Misi ke-3	Tujuan Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab
Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berdaya saing, (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan public	1. Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab	1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	- Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	Bag. Renkeu
				- Nilai/Katagori SAKIP Perangkat Daerah	>70 (BB)	
				- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,70	Bag. Umum
				- Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	100%	
				- Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	100%	

			1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	- Nilai Kematangan Perangkat Daerah	35	Bag. Organisasi	
				- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	80,70		
				- Nilai AKIP Kabupaten	>61,50 (B)		
				1.3. Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	- Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	Bag. Protokoler
		2. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah	2.1	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	- Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	Bag. Tapem
					- Skor LPPD	3<ST<4	
			2.2.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	- Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	Bag. Kesra
2.3.	Meningkatnya penataan produk hukum daerah		- Persentase Produk Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	Bag. Hukum		

			2.4. Meningkatnya Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	- Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang Terfasilitasi	100%	Bag. Kerjasama
			2.5. Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	- Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	100%	Bag. Perekonomian
			2.6. Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah	- Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	Bag. ADP
				- Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	100%	Bag. PBJ
			2.7. Meningkatnya koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	- Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	100%	Bag. SDA



### 3.3. Program Dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan serta sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya APBN dan atau daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau kesemua sumber daya tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708/2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kuangan Daerah, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Sekretariat Daerah dengan 3 (Tiga) Program diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 13 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan rincian 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 6 Kegiatan dan 23 sub kegiatan diklaksanakan oleh Bagian Umum, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dibawah kendali Bagian Organisasi, serta 1 kegiatan dan 3 dub kegiatan dipertanggung jawabkan bagian Peotokoler Pimpinan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat teridir 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan rincian 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dikerjakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, 1 kegiatan 3 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan

Rakyat, dan 1 kegiatan 3 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Hukum, serta 1 kegiatan 3 sub kegiatan oleh Bagian Kerjasama.

Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh 4 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah yaitu Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Sumber Daya Alam yang masing-masing melaksanakan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Adapun rincian program dan kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.3.1 berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023**

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah Setda	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

				Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Konsultasi yang diklaksanakan</b>	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	J'Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>Persentase BMD terkelola dengan baik</b>	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
	<b>Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat kehadiran pegawai / ASN</b>	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	<b>Bagian Umum</b>	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi umum</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH</b>	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	<b>Bagian Umum</b>	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia</b>	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan					
<b>Nilai AKIP Kabupaten</b>	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>Nilai Kematangan Perangkat Daerah</b>	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<b>Bagian Organisasi</b>	
			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
			<b>Nilai AKIP Kabupaten</b>	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
<b>Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi</b>	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	
			Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
			Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase keterisian data IKK LPPD	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Skorr LPPD	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Tapem
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat	Capaian Prestasi MTQ tingkat Provinsi	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian KESRA	
			Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
			Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		

	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang ditudingkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang ditudingkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</b>	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	<b>Bagian Hukum</b>
				Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	
	<b>Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Jumlah kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi</b>	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	<b>Bagian Kerjasama</b>
				Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan</b>	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	<b>Bagian Perekonomian</b>
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	



	<b>Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah</b>	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	<b>Bagian Adm. Pembangunan</b>
				Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
				Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
	<b>Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan tuntas</b>	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	<b>Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif</b>	<b>Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah Kebijakan dan Fasilitasi Urusan Sumber Daya Alam yang Terlaksana dengan efektif</b>	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	<b>Bagian Sumber Daya Alam</b>
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) menyebutkan "Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dan RPJMD menggunakan bahan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah". Oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2023 s/d tahun 2024 beserta sumber dana kegiatan, sebagai berikut :

Tabel TC. 33

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

## Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program,Kegiatan,Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program, Kegiatan ,Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Rencana Tahun 2024		Penanggung jawab
			lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Tanjung Barat	100%	30,680,421,790	APBD		100%	32,707,562,788	Bagian Renkeu
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	Kab. Tanjung Barat	100%	666,475,600	APBD		100%	703,599,750	
		Nilai AKIP Perangkat Daerah Setda	Kab. Tanjung Barat	65,45 (B)				67,75 (B)		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Barat	4 Dokumen	245,190,800	APBD		4 Dokumen	250,500,000	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	105,325,000	APBD		1 Dokumen	110,591,250	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	94,434,900	APBD		1 Dokumen	103,878,500	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tanjung Barat	4 Laporan	140,510,000	APBD		4 Laporan	150,250,000	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Barat	2 Laporan	81,014,900	APBD		2 Laporan	88,380,000	

4.01.01.2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	100%	<b>19,891,401,180</b>	<b>APBD</b>		100%	<b>20,945,630,589</b>
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanjab Barat	132 Orang/Bulan	18,297,088,180	APBD		134 Orang/Bulan	19,211,942,589
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	1,323,580,000	APBD		1 Dokumen	1,455,938,000
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	175,485,000	APBD		1 Dokumen	180,250,000
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tanjab Barat	2 Dokumen	95,248,000	APBD		2 Dokumen	97,500,000
4.01.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>8,179,935,800</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>8,997,929,380</b>
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanjab Barat	12 Laporan	8,179,935,800	APBD		12 Laporan	8,997,929,380
4.01.01.2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>1,767,484,210</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1,879,903,069</b>
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanjab Barat	2 Orang/Bulan	1,171,084,210	APBD		2 Orang/Bulan	1,229,638,421
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	6 Paket	68,400,000	APBD		6 Paket	85,264,648
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanjab Barat	2 Orang	100,000,000	APBD		2 Orang	125,000,000
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanjab Barat	2 Orang/Bulan	428,000,000	APBD		2 Orang/Bulan	440,000,000
4.02.01.2.03	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>Persentase BMD terkelola dengan baik</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>175,125,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>180,500,000</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	2 Laporan	175,125,000	APBD		2 Laporan	180,500,000

4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	Kab. Tanjab Barat	100%	24,724,076,300	APBD		100%	29,651,469,623	Bagian Umum
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)	Kab. Tanjab Barat	80,80				81,00		
4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	Kab. Tanjab Barat	100%	932,852,100	APBD		100%	1,056,567,310	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tanjab Barat	5 Paket	736,485,100	APBD		5 Paket	809,033,830	
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Tanjab Barat	3 Dokumen	61,367,000	APBD		3 Dokumen	97,533,480	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tanjab Barat	27 Orang	135,000,000	APBD		30 Orang	150,000,000	
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	3,776,259,000	APBD		12 Bulan	4,805,432,776	
4.01.01.2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 Paket	435,030,000	APBD		1 Paket	1,025,904,554	
4.01.01.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	2 Paket	947,013,000	APBD		2 Paket	1,041,715,161	
4.01.01.2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	3 Paket	394,487,000	APBD		3 Paket	434,523,672	
4.01.01.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 Paket	737,653,600	APBD		1 Paket	914,879,543	
4.01.01.2.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	2 Paket	239,023,000	APBD		2 Paket	263,045,716	
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	1,023,052,400	APBD		1 Laporan	1,125,364,130	

4.01.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>5,657,473,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>6,793,639,111</b>	Bagian Umum
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	12 Unit	4,282,782,000	APBD		14 Pakett	5,187,000,000	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	2 Pakett	325,460,300	APBD		2 Pakett	452,213,520	
4.01.01.2.07.06	Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	50 Unit	1,049,230,700	APBD		53 Unit	1,154,425,591	
4.01.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>4,921,404,800</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>5,739,955,400</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanjab Barat	2 Laporan	555,163,800	APBD		2 Laporan	671,228,250	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	1,998,809,000	APBD		1 Laporan	2,198,689,900	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	618,409,000	APBD		1 Laporan	762,437,250	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	1,749,023,000	APBD		1 Laporan	2,107,600,000	
4.01.01.2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>6,955,365,900</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>8,127,081,490</b>	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tanjab Barat	125 Unit	3,488,180,000	APBD		145 Unit	3,837,774,490	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Tanjab Barat	313 Unit	70,050,000	APBD		330 Unit	77,055,000	

'4.01.012.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tanjab Barat	600 Unit	913,535,900	APBD		625 Unit	1,062,469,650	
'4.01.012.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tanjab Barat	15 Unit	2,483,600,000	APBD		15 Unit	3,149,782,350	
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>2,480,721,500</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>3,128,793,536</b>	
04.01.012.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	3 Paket	1,536,421,500	APBD		3 Paket	1,768,521,000	
04.01.012.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	3 Paket	685,950,000	APBD		3 Paket	857,727,078	
04.01.012.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Tanjab Barat	3 Paket	258,350,000	APBD		3 Paket	502,545,458	
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Perangkat Daerah		32	1,308,999,800	APBD		35	1,439,900,000	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.7				85		
		Nilai AKIP Kabupaten		>61,50				>62,50		
'4.01.012.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	412,499,800	APBD		1 Dokumen	453,750,000	
'4.01.012.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	511,500,000			1 Laporan	562,650,000	
'4.01.012.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	385,000,000			1 Dokumen	423,500,000	
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>1,773,923,300</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>3,925,006,112</b>	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
'4.01.012.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	526,871,500	APBD		1 Laporan	632,246,112	
'4.01.012.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	702,300,000	APBD		1 Laporan	842,760,000	
'4.01.012.14.03	Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	544,751,800	APBD		1 Laporan	2,450,000,000	

4.01.02	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase keterisian data IKK LPPD</b>	Kab. Tanjab Barat	100%	17,170,189,700	APBD		100%	19,659,800,000	Bagian Tapem
4.01.02.2.01	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Skorr LPPD</b>	Kab. Tanjab Barat	3<ST<4	1,571,899,300	APBD		3<ST<4	1,711,200,000	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Tanjab Barat	4 Dokumen	575,899,800	APBD		4 Dokumen	620,000,000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Tanjab Barat	2 Dokumen	525,500,000	APBD		2 Dokumen	580,500,000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Tanjab Barat	3 Dokumen	470,499,500	APBD		3 Dokumen	510,700,000	
4.01.02.2.02	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>13,336,704,800</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>15,447,600,000</b>	Bagian KESRA
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Tanjab Barat	8 Dokumen	9,137,004,800	APBD		8 Dokumen	10,248,700,000	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Tanjab Barat	9 Dokumen	3,916,000,000	APBD		9 Dokumen	4,307,600,000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Tanjab Barat	4 Dokumen	283,700,000	APBD		4 Dokumen	641,300,000	
4.01.02.2.02.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Tanjab Barat	Keluarga	-	APBD		25 Keluarga	125,000,000	
4.01.02.2.02.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kab. Tanjab Barat	Keluarga	-	APBD		25 Keluarga	125,000,000	



4.01.02.2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang dindahkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</b>	Kab. Tanjab Barat	100%	1,376,586,000	APBD		100%	1,556,000,000	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Tanjab Barat	4 Dokumen	501,000,000	APBD		4 Dokumen	576,000,000	
4.01.02.2.03.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Tanjab Barat	2 Kasus	425,000,000	APBD		2 Kasus	500,000,000	
4.01.02.2.03.03	Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Tanjab Barat	5 Dokumen	450,586,000	APBD		5 Dokumen	480,000,000	
4.01.02.2.04	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>884,999,600</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>945,000,000</b>	Bagian Kerjasama
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Tanjab Barat	3 Dokumen	379,999,800	APBD		3 Dokumen	400,000,000	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Tanjab Barat	2 Dokumen	319,999,900	APBD		2 Dokumen	340,000,000	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Tanjab Barat	5 Laporan	184,999,900	APBD		5 Laporan	205,000,000	
4.01.03	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>10,236,654,500</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>36,839,900,000</b>	Bagian Perekonimian
4.01.03.2.01	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>8,213,330,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>34,400,000,000</b>	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Tanjab Barat	2 Dokumen	6,820,560,000	APBD		2 Dokumen	30,700,000,000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Tanjab Barat	2 Laporan	471,815,000	APBD		2 Laporan	1,300,000,000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Tanjab Barat	2 Dokumen	322,695,000	APBD		2 Dokumen	1,300,000,000	
4.13.2014	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	305,630,000	APBD		1 Dokumen	550,000,000	
4.13.2015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	292,630,000	APBD		1 Dokumen	550,000,000	

4.01.03.2.03	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>100%</b>	<b>1,016,009,100</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanjab Barat	150 Dokumen	374,556,000	APBD		165 Dokumen	500,000,000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Tanjab Barat	44 Dokumen	447,564,000	APBD		44 Dokumen	300,000,000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanjab Barat	80 Orang	193,889,100	APBD		80 Orang	200,000,000	
4.01.03.2.04	<b>Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>80%</b>	<b>676,500,000</b>	<b>APBD</b>		<b>80%</b>	<b>744,150,000</b>	<b>Bagian SDA</b>
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	346,500,000	APBD		1 Dokumen	181,500,000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	165,000,000	APBD		1 Dokumen	181,500,000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	165,000,000	APBD		1 Dokumen	381,150,000	
<b>Jumlah Total</b>					<b>85,894,265,390</b>				<b>124,223,638,523</b>	

Berdasarkan tabel diatas tergambar bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 3 (Tiga) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota merupakan program rutin atau non urusan yang terdiri dari 12 (Dua Belas) kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) sub kegiatan dan dilaksanakan oleh Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Organisasi dan Bagian Protokoler dan komunikasi Pimpinan.
2. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat merupakan urusan Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dan 12 (Dua Belas) sub kegiatan dan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama.
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan juga merupakan urusan Sekkretariat Daerah yang teridiri 4 (Empat) kegiatan dan 16 (Enam Belas) sub kegiatan, diklaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Bagian Sumber Daya Alam pada sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **1.1 CATATAN PENTING**

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama ini di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tupoksi, tidak mengalami kendala yang berarti. Permasalahan yang dihadapi hanya karena keterbatasan pagu anggaran yang tersedia setiap tahunnya yang membuat beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan seoptimal mungkin untuk menunjang Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keterbatasan anggaran yang tersedia tersebut mengharuskan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan.

### **1.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN**

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada RJPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memperhatikan isu-isu strategis yang ada pada setiap bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digunakan untuk Tahun Anggaran 2023, sebagai acuan penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2023. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Renja ini merupakan penjabaran visi, misi, dan tujuan yang akan diambil disertai dengan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan sehingga merupakan salah satu dasar untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### 1.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Tahun Anggaran 2023. Dalam kaitan itu, diharapkan DPRD bersama masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2023 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah dan masing-masing Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf pelaksana selama 1 (satu) tahun kedepan dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan, Terima kasih.

Kuala Tungkal, Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
  
**Ir. H. AGUS SANUSI, M.S.i**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP.19680817 199203 1 007**